



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TYAS NGAMBAR WIDYOWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 237573

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.571.000.000

1. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 870 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 3365 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.800.000.000
4. Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 877 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 982 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 830 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 45.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 1.194.300.000

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 181.844.249

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 103.000.000

**Sub Total**

Rp. 6.095.144.249



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.095.144.249

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.